

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMD Dalduk dan KB tahun 2017 disusun berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP yang disusun oleh Dinas PMD Dalduk dan KB dalam rangka memberikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, serta dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan berpedoman pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian program yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi dan dukungan serta peran serta dari seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan (*stakeholders*).

LKjIP Dinas PMD Dalduk dan KB ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, semoga bermanfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan eksistensi Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 26 Januari 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pt. Kepala  
  
JUMANTO, SH  
NIP. 19610121 198201 1 007

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi.....	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1 Perencanaan Strategis.....	6
2.1.1 Tujuan .....	6
2.1.2 Sasaran .....	6
2.2 Penetapan Kinerja.....	6
2.2.1 Target Belanja Dinas PMD Dalduk dan KB .....	9
2.2.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.3 Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya Manusia .....	19
3.3.1 Akuntabilitas Anggaran .....	19
3.3.2 Akuntabilitas Sumber Daya Manusia .....	21
3.3.3 Akuntabilitas Sarana dan Prasarana .....	23
BAB IV. PENUTUP.....	24
Lampiran.....	25
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas PMD Dalduk dan KB KAB. KULON PROGO PERBUP NO : 58 tahun 2016 .....	25

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2017 secara keseluruhan terdiri dari 81 PNS yang terdiri dari 17 pejabat struktural dan 22 staf dan 42 personil Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

### 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa;
3. Melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk;
4. Melaksanakan kegiatan keluarga berencana; dan
5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Uraian tugas Sekretariat dan Bidang sesuai dengan susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan;
3. Melaksanakan kegiatan keuangan;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas;
  5. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sistem informasi.
- Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
1. Menyenggarakan pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa
  2. Menyenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sistem informasi; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi pembinaan, fasilitasi dan bimbingan kelembagaan dan aparatur pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan pendapatan desa serta pengelolaan kekayaan desa.
- Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :
1. Menyenggarakan pembinaan kelembagaan dan aparatur pemerintah desa;
  2. Menyenggarakan pengelolaan keuangan dan pendapatan desa;
  3. Menyenggarakan pengelolaan kekayaan desa; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi penyelenggaraan advokasi dan penyuluhan serta pengendalian penduduk dan informasi.
- Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :
1. Menyenggarakan advokasi dan penyuluhan;
  2. Menyenggarakan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi penyelenggaraan jaminan dan kesertaan keluarga berencana serta ketahanan kesejahteraan keluarga.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan jaminan dan kesertaan Keluarga Berencana;
  2. Menyelenggarakan kegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta tata kerja, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

#### **1. Kepala**

#### **2. Sekretariat terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### **3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :**

- a. Seksi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sistem Informasi.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :**

- a. Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
- b. Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa; dan
- c. Seksi Administrasi Kekayaan Desa.

#### **5. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :**

- a. Seksi Advokasi dan Penyuluhan; dan
- b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi.

#### **6. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :**

- a. Seksi Jaminan dan Kesertaan Keluarga;
- b. Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

#### **8. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **1.3. Aspek Strategis Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka Dinas PMD Dalduk dan KB telah menyusun Renstra 2017 – 2022 dengan mengacu pada RPJMD 2017 – 2022 yang memuat visi misi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode tahun 2017 – 2022 berikut target output dan outcome yang akan dicapainya. Dalam Renstra tersebut telah mencakup strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya ketahanan keluarga.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya kapasitas otonomi desa

### **1.4. Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Dalduk dan KB secara umum yang meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

1. Pelayanan KB terkendala topografis wilayah dan jumlah SDM di lini lapangan.
2. Peran kader dalam pembinaan kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL) PIK R dan UPPKS masih kurang.
3. Belum kuatnya jejaring program KKBPK.
4. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa meningkat.
5. Pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa masih kurang.

Sedangkan untuk isu strategis (lingkungan eksternal) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Identifikasi isu – isu strategis ( Lingkungan Eksternal )

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain - Lain
Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) yang dibentuk memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global, menuntut kesiapan SDM di masyarakat untuk menghadapi persaingan global	Angka Kemiskinan dan indeks ratio gini yang besar menjadi tantangan bagi upaya pengentasan kemiskinan	Program-program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
	Isu ketahanan keluarga yang makin menurun ditandai dengan tingginya angka perceraian, meningkatnya kasus kenakalan menjadi tantangan bagi upaya pembangunan keluarga	Komitmen pemda untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga dengan advokasi dan KIE melalui kelompok kelompok kegiatan	
	Peningkatan anggaran dan kewenangan desa berimplikasi pada peningkatan pemberdayaan pemerintahan desa.	Pemerintah Daerah harus mensikapi dengan menyiapkan regulasi, peningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pemerintah Desa, meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap pemerintah desa	

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Dinas PMD Dalduk dan KB dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada RKPD tahun 2017 berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 5 tahun (tahun 2017 – 2022) dengan memperhitungkan potensi organisasi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program kegiatan.

#### 2.1.1. Tujuan

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

#### 2.1.2. Sasaran

1. Meningkatnya ketahanan keluarga.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatnya kapasitas otonomi desa.

Renstra 2017-2022 tersebut yang dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun 2017 dan telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

### 2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan komitmen bersama atau janji organisasi untuk mewujudkan target kinerja tahunan yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program / kegiatan dan anggaran.

Penetapan kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembinaan Keluarga Berencana	56,88	Advokasi KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	1.440.685.900



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	Program/Kegiatan	Anggaran
	dan Ketahanan Keluarga		Pendataan Keluarga	48.589.850
			Pembinaan Masyarakat Peduli KB	84.101.975
			Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	83.319.300
			Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	75.601.850
			Peningkatan Jejaring Kelembagaan Ketahanan Keluarga SEjahtera	43.496.450
			Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk	31.027.350
			Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon	32.063.300
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa	Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa	41,65	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	71.757.150
			Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa	54.076.675
			Pendampingan Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	45.542.125
			Pembinaan tata pemerintahan desa	146.055.550
			Pembinaan Pengelolaan Asset Desa	34.514.350
			Pembinaan Administrasi Desa	38.961.750
Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi	Capaian Penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan	47,20	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan TTG	113.884.025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	Program/Kegiatan	Anggaran
desa	ekonomi desa		Peningkatan Partisipasi Masyarakat	192.774.800
			Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	131.662.950
			Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa	96.906.900
			Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa	104.073.000

Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2017 tersebut, maka target sasaran yang akan dicapai sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang telah ditetapkan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan Dinas PMD Dalduk dan KB tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Dalduk dan KB  
tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target (%)
1	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	%	<b>56,88</b>
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	%	<b>47,20</b>
3	Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	%	<b>41,65</b>

Sumber : Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo

### 2.2.1. Target Belanja Dinas PMD Dalduk dan KB

Tabel 2.3  
Target Belanja Dinas PMD Dalduk dan KB Tahun 2017

Uraian	Target	Persentase
Belanja Langsung	3.646.388.300	39,47 %
Belanja Tidak Langsung	5.591.955.056	60,53%
<b>Jumlah</b>	<b>9.238.343.356</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo

### 2.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Tabel 2.4  
Jumlah Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	639.261.675	18,98%	
2	Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	390.907.600	24,04%	
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	1.838.885.975	42,68%	Dana APBD Murni dan DAK
<b>Jumlah</b>		<b>2.869.055.250</b>	<b>100%</b>	

Sumber: Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian kinerja yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Hasil pengukuran indikator kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun  
Anggaran 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
1.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	%	<b>56,88</b>	53,69	94,40 %	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	%	<b>47,20</b>	47,01	99,59 %	
3.	Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	%	<b>41,65</b>	38,35	82,47%	

Dari tabel 3.2, terdapat tiga sasaran strategis dengan tiga indikator sasaran strategis yang juga merupakan IKU Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan klasifikasi dalam Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian seluruh indikator kinerja sasaran strategis dalam klasifikasi sangat baik, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Keluarga dengan realisasi 94,40 % kurang dari target;
2. Indikator Indeks Partisipasi Masyarakat dengan realisasi 99,59 % kurang dari target;
3. Indikator Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa dengan realisasi sebesar 82,47 kurang dari target;

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo menurut Sasaran Strategis adalah sebagai berikut.

#### 3.2.1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Tolak ukur capaian sasaran ke-1 (Meningkatnya Ketahanan Keluarga) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Keluarga.

Tabel 3.3  
Indeks Ketahanan Keluarga 2017

No.	Indikator	2017			Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2017 terhadap 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Ketahanan Keluarga	56,88%	53,69%	94,40%	63,26%	84,87%

Capaian kinerja 2017 untuk indikator Indeks Ketahanan Keluarga menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (94,40%). Kondisi ini juga telah menyumbang sebanyak 84,87% dari target pada akhir RPJMD. Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD capaian ini sudah sangat baik, meskipun capaian pada tahun berjalan tidak dapat tercapai 100%. Kesertaan KB Aktif sebanyak 70,22% telah menyumbang 40% Indeks Ketahanan Keluarga sedangkan 60% lainnya dicapai oleh pembinaan keluarga melalui pembinaan kelompok bina keluarga dan pendidikan kependudukan di tingkat sekolah. Capaian peserta KB aktif tidak mencapai target yang diharapkan hal ini dikarenakan oleh masih tingginya PUS bukan peserta KB yang tidak terlayani (unmet need). Besarnya unmet need Kulon Progo tahun 2017 sebesar 13,32% lebih besar dari target nasional sebesar 10,06%.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa Advokasi dan KIE, Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pendataan Keluarga, Pembinaan Masyarakat Peduli KB, Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS), Peningkatan Jejaring Kelembagaan Ketahanan Keluarga Sejahtera, Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk, Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon.

Adapun target Capaian Kinerja SKPD tahun 2017 (IKU SKPD) Indeks Ketahanan Keluarga sejumlah 56,88% didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Sasaran SKPD	IKU SKPD	Satuan	Cara Perhitungan	Target th. 2017	Realisasi th. 2017
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	%	((Partisipasi KB aktif/jumlah PUSx40%)+(jumlah keluarga yang masuk kel BKB/Jumlah keluarga sasaran BKBx10%)+(Jumlah keluarga yang masuk kel BKR/Jumlah keluarga sasaran BKRx10%(jumlah keluarga yang masuk kel BKL/jumlah keluarga sasaran BKLx10%)+(Jumlah sekolah SLTP yang mendapat pendidikan kependudukan/jumlah SLTPx30%)	56,88%	53,69%
			Peserta KB Aktif	53.670	45.135
			PUS	67.917	64.281
			Jumlah Keluarga Anggota BKB	11.122	11.006
			Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan BKB	13.130	13.017
			Jumlah Keluarga Anggota BKR	4.454	4.411
			Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan BKR	5.239	5.199
			Jumlah Keluarga anggota BKL	4.565	4.511
			Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan BKL	5.499	5.434
			Jumlah Sekolah SLTP yang mendapat pendidikan kependudukan	0	1
			Jumlah Sekolah SLTP	82	82

### *Permasalahan dan Solusi*

#### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam indeks ketahanan keluarga, prosentase peserta KB aktif (PA/PUS) masih kurang optimal hal ini bisa dilihat di angka unmet need sebesar 13,32% lebih besar dari target nasional 10,06%, hal ini disebabkan antara lain karena :

- a) Kunjungan rumah kepada calon akseptor oleh sebagian besar Penyuluh KB tidak optimal karena kondisi geografis yang cukup sulit, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak
- b) Kesadaran kaum pria untuk mengikuti program KB masih rendah, hadiah/reward kambing bagi peserta Kb pria metode MOP sudah tidak terlalu menarik.

#### b. Solusi

- a) Meningkatkan peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk melakukan kunjungan rumah dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap kader IMP.
- b) Meningkatkan KIE dan advokasi program KB kepada calon peserta KB pria dengan metode KIE berbasis komunitas.
- c) Meningkatkan advokasi dan KIE program KKBPK melalui kelompok kelompok kegiatan utamanya melalui kampung KB serta kelompok kegiatan di luar kampung KB..

### **3.2.2 Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan**

Tolok ukur capaian sasaran ke-2 (Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Indeks Partisipasi Masyarakat.



Tabel 3.4  
Indeks Partisipasi Masyarakat

No.	Indikator	2017			Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2017 terhadap 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Partisipasi Masyarakat	47,20 %	47,01%	99,59%	65,64%	71,61%

Capaian 2017 sesuai data dasar RPJMD 2017-2022

Capaian kinerja 2017 untuk Indeks Partisipasi Masyarakat menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (99,59%). Capaian kinerja tahun 2017 ini menyumbang sebanyak (71,61%) dari target akhir RPJMD 2022. Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan TTG, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa, Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa.

Adapun target Capaian Kinerja SKPD tahun 2017 (IKU SKPD) Indeks Partisipasi Masyarakat sejumlah 47,20% didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Sasaran SKPD	IKU SKPD	Satuan	Cara Perhitungan	Target th. 2017	Realisasi th. 2017
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	%	((Jumlah swadaya masyarakat/Jumlah Dana Program x 60%)+(Jumlah PKK Aktif, LPMD aktif/Jumlah PKK dan LPMD x 40%)	47,20%	47,01%
			Jumlah swadaya masyarakat	330.000.000	317.621.000
			Jumlah dana bantuan sosial yang disalurkan	1.250.000.000	1.218.000.000
			Jumlah PKK Aktif, LPMD Aktif	138	138
			Jumlah PKK dan LPMD	176	176

### Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indeks partisipasi masyarakat adalah :
  - a) Swadaya masyarakat masih belum dapat diukur dengan tepat dikarenakan laporan dari masyarakat kurang lengkap.
  - b) Lembaga kemasyarakatan secara kelembagaan sudah ada namun peran dan fungsinya belum optimal, terutama untuk LPMD hal ini dikarenakan peran dan fungsi LPMD belum kuat payung hukumnya.
- b. Solusi
  - a) Menertibkan laporan penyelenggaraan pembangunan di masyarakat.
  - b) Memberikan arahan kepada pemerintah desa agar memberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

### 3.2.3. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa

Tolak ukur capaian sasaran ke-3 (Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa ) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa.

Tabel 3.5  
Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

No	Indikator	2017			Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2017 terhadap 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	41,65	38,35%	82,47%	80.00%	47,94%

*Capaian 2017 sesuai data dasar RPJMD 2017-2022*

Capaian kinerja 2017 untuk indikator Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang baik (82,47%). Capaian kinerja tahun 2017 ini menyumbang sebanyak (47,94 %) dari target akhir RPJMD 2022. Capaian kinerja tersebut didukung oleh

program-program kegiatan berupa; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa, Pendampingan Pemilihan Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD, Pembinaan Tata Pemerintahan Desa, Pembinaan Pengelolaan Asset Desa, Pembinaan Administrasi Desa.

Adapun target Capaian Kinerja SKPD tahun 2017 (IKU SKPD) Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa sejumlah 41,65% didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Sasaran SKPD	IKU SKPD	Satuan	Cara Perhitungan	Target th. 2017	Realisasi th. 2017
Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	%	((Jumlah APBDes yang ditetapkan tepat waktu/jumlah Desa x 100%)+(jumlah realisasi penyerapan ADD,DD,Bagi hasil Pajak, dan retribusi/jumlah ADD,DD,Bagi hasil pajak, dan retribusi x 100%)+(jumlah penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa/jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa x 100%)+(jumlah pengisian jabatan aparatur pemerintahan desa/jumlah jabatan aparatur pemerintahan desa yang kosong x 100%)+(jumlah Desa tertib asset/jumlah Desa x 100%))/5	41,65%	38,35%
			Jumlah Perdes APBDes yang disampaikan tepat waktu (7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan)	18	9
			Jumlah Perdes APBDes	87	87
			Jumlah Perdes RKPDes yang disampaikan tepat	10	11

			waktu (7 hari setelah tanggal ditetapkan)		
			Jumlah Perdes RKPDes	87	87
			Jumlah realisasi penyerapan ADD, DD, Pajak, Retribusi	121.500.000.000	155.245.508.699
			Jumlah ADD, DD, Pajak, Retribusi	162.000.000.000	157.327.759.745
			Jumlah penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa	7	16
			Jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa	16	16
			Jumlah pengisian jabatan aparatur pemerintahan desa	38	32
			Jumlah jabatan aparatur pemerintahan desa yang kosong	50	40
			Jumlah desa tertib asset	20	15
			Jumlah desa	87	87

#### *Permasalahan dan Solusi*

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam capaian peningkatan kapasitas ekonomi desa adalah :
  - a) Penyampaian Perdes tentang RKPDes kepada Bupati dan Perdes tentang APBDes belum tepat waktu. Ini terjadi karena belum semua desa memahami, bahwa ketepatan waktu penting dilakukan dalam rangka mengakomodir hak-hak keuangan desa itu sendiri dan hak publik lainnya bagi warga desa.
  - b) Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum tertib administrasinya baik administrasi pemerintahan umum maupun dalam pengelolaan asetnya. Pengelolaan administrasi dan aset yang tertib mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b. Solusi
  - a) Meningkatkan kapasitas/pemahaman aparatur desa dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa.

- b) Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tentang administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Aset Desa.

### **3.3. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya**

#### **3.3.1. Akuntabilitas Anggaran**

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 sebesar Rp. 9.238.343.356,13,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.591.955.056,13,- atau 60,53% dan belanja langsung sebesar Rp. 3.646.388.300,- atau 39,47%.

Penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2017 sebesar Rp. 3.281.563.685,- dari total anggaran Rp. 3.646.388.300,- atau sebesar 89,99% yang dialokasikan. Realisasi anggaran belanja langsung pendukung sebesar Rp. 622.149.421,- Dari Rp. 777.333.050,- atau 80,04% dan realisasi Total belanja utama sebesar Rp. 2.659.414.256,- dari Rp. 2.869.055.250. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya ketahanan keluarga 96,90%, Utamanya untuk Pembinaan Masyarakat Peduli KB, Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS). Sedangkan realisasi anggaran terendah pada cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sebesar 84,01%, Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Capaian	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	56,88	53,69	94,40	1.838.885.975	1.781.793.782	96,90 %
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	47,20	47,01	99,59	639.261.675	537.062.432	84,01 %
3	Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	41,65	38,35	82,47	390.907.600	340.558.050	87,12 %
	Total Belanja Utama					2.869.055.250,00	2.659.414.264,00	95,93 %
	Belanja Langsung Pendukung					777.333.050,00	622.149.421,00	80,036 %
	Total Belanja Langsung					3.646.388.300,00	3.281.563.685,00	89,99 %

Pada tabel 3.6 dapat dilihat gambaran realisasi kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya ketahanan keluarga, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) sasaran tercapai sebesar 94,40 % disertai penyerapan anggaran mencapai 96,90%. Melihat penyerapan anggaran sebesar 96,90 % apabila dibandingkan dengan capaian sasaran kinerja meningkatnya ketahanan keluarga sebesar 94,40 %, maka pemanfaatan anggaran dapat dikatakan kurang efisien (input > output dan outcome)
2. Sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) tercapai sebesar 99,59 % disertai penyerapan anggaran mencapai 84,01%. Penyerapan anggaran dibandingkan dengan capaian sasaran kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 99,59 % maka penyerapan anggaran dapat dikatakan efisien.
3. Sasaran strategis meningkatnya kapasitas otonomi desa, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) tercapai sebesar 82,47 % disertai penyerapan anggaran sebesar 87,12 %. Berdasarkan serapan anggaran yang kurang dari 90 % dan capaian kinerja meningkatnya kapasitas otonomi desa yang kurang dari target maka bisa dikatakan penggunaan anggaran kurang maksimal .

### 3.3.2. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 81 orang yang terinci berdasarkan kriteria yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Data Pegawai Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo Menurut Jumlah Kebutuhan Pegawai Tahun 2017

No	Struktur Organisasi	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Yang Terisi	Kekuangan
1	Kepala	1	0	1
2	Sekretariat	20	12	8
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12	7	5
4	Bidang Pemerintahan Desa	16	8	8
5	Bidang Pengendalian Penduduk	10	5	5
6	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12	7	5
7	PKB	54	42	12
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>	<b>81</b>	<b>44</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Dalduk dan KB



## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban publik atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud penjabaran urusan yang diampu oleh Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo. Selain itu LKjIP ini merupakan perwujudan jajaran Dinas PMD Dalduk dan KB dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Secara umum sasaran-sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai dengan sangat baik. Adapun target dan realisasi IKU tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Keluarga tercapai 53,69% (94,40%) dari target 56,88%
2. Indeks Partisipasi Masyarakat tercapai 47,01% (99,59%) dari target 47,20%
3. Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa tercapai 38,35% (82,47%) dari target 41,65%

Hal tersebut diatas dapat dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, serta kerja keras seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas PMD Dalduk dan KB KABUPATEN KULON PROGO  
PERBUP NO : 58 tahun 2016

